

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN PRINSIP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, IMPLEMENTASI  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN  
BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris pada BKD Kabupaten Boyolali)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**AMAMILA ELKA SAPUTRI**  
**B200140165**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN PRINSIP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, IMPLEMENTASI  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN  
BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada BKD Kabupaten Boyolali)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**AMAMILA ELKA SAPUTRI**

**B 200 140 165**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Dra. Nursiam, M.H., Akt., CA**  
**NIDN. 0624096401**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN PRINSIP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, IMPLEMENTASI  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN  
BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada BKD Kabupaten Boyolali)**



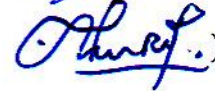
Yang ditulis oleh :

**AMAMILA ELKA SAPUTRI**

**B 200 140 165**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 5 April 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Nursiam, M.H., Akt., CA (Ketua Dewan Penguji) (  )
2. Dr. Erma Setiawati, M.M., Akt (Anggota 1 Dewan Penguji) (  )
3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si. (Anggota 2 Dewan Penguji) (  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
  
Dr. Syamsudin, MM

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat pernah tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Maret 2018

Penulis



Amamila Elka Saputri

**B 200140165**

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN PRINSIP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, IMPLEMENTASI  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN  
BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris pada BKD Kabupaten Boyolali)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 38 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah, dan pemahaman basis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** kualitas laporan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintah, pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual

**Abstract**

This study aims to determine the influence of human resources, the implementation of local financial management principles, the implementation of government accounting standards, and understanding the accrual basis of the quality of local government financial statements. The approach used in this study is the quantitative approach. The data in this study is the primary data obtained from respondents and distributed directly. The population of this study is all employees of the Regional Finance Board (BKD) Boyolali District. The technique of determining the sample using purposive sampling technique with the number of respondents as many as 38 people. The data analysis technique used multiple linear regression analysis using SPSS version 20 program. The result of research shows human resources, the implementation of regional finance management principle, the implementation of government accounting standard, and the understanding of the accrual basis does not affect the quality of local government financial report.

**Keywords:** quality of financial statement, human resources, financial management, government accounting standards, understanding of government accounting system regulation based on accrual

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik Soimah (2014). Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Suhaeti dan Suhendar, 2015).

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana (2010:96) dalam Nagor, dkk (2015). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan

#### 4) Dapat dipahami

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Menurut Ihsanti (2014) kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi Sumber Daya Manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, dkk, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Nagor, dkk, 2015). Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) dalam Nagor, dkk (2015), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suhaeti dan Suhendar, 2015).



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut PP RI No.71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah (Suhaeti dan Suhendar, 2015). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nufus, 2015). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah diterima baik pusat maupun daerah. SAP digunakan dalam laporan keuangan untuk memahami informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK) (Mahlil dan Yahya, 2017).

Salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota atau pegawai tentang prosedur, peraturan dan kebijakan daerah. Pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Sehingga tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kartikasari, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada BKD Kabupaten Boyolali. Alasan



dipilihnya judul tersebut adalah untuk mengetahui seberapa baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali.

## **2. METODE**

### **2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali yang berjumlah 79 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini yaitu : 1) Pegawai yang bekerja dalam bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali, 2) Pegawai yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Akuntansi, 3) Masa kerja minimal 1 tahun.

### **2.2 Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali sebagai responden dalam penelitian ini.

### **2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **2.3.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang diadaptasi dari PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dipahami
- 4) Dapat dibandingkan

### **2.3.2 Sumber Daya Manusia**

Variabel Sumber Daya Manusia diukur menggunakan 9 item pertanyaan yang diadaptasi dari Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban (2001). Indikator yang digunakan untuk menilai sumber daya manusia diantaranya:

- 1) Kemampuan individu
- 2) Organisasi dan kelembagaan
- 3) Sistem untuk mencapai tujuan

### **2.3.3 Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Variabel Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah diukur menggunakan 10 item pertanyaan yang diadaptasi dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya:

- 1) Paham pengelolaan keuangan daerah
- 2) Penyusunan APBD
- 3) Paham peraturan daerah

### **2.3.4 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah**

Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah diukur menggunakan 14 item pertanyaan yang diadaptasi dari PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk menilai implementasi standar akuntansi pemerintah diantaranya:

- 1) Penerapan basis akrual
- 2) Penerapan basis kas
- 3) Penyajian secara wajar

### **2.3.5 Pemahaman Basis Akrual**

Variabel Pemahaman Basis Akrual diukur menggunakan 7 item pertanyaan yang diadaptasi dari Hasibuan (2013) dalam Purwaningrum (2017). Indikator yang digunakan untuk menilai pemahaman basis akrual adalah kemampuan pengetahuan berhubungan dengan akuntansi.

## **2.4 Metode Analisis Data**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan menguji apakah sumber daya manusia,

penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji realibilitas untuk mengukur seberapa handal kuesioner yang digunakan dan setelah pengujian tersebut dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji statistik t, uji statistik F, dan uji determinasi ( $R^2$ ). Setelah uji asumsi dan uji ketetapan maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut :

$$KLK = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2PKD + \beta_3SAP + \beta_4PBA + e$$

Keterangan:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi Sumber Daya Manusia (X1)

$\beta_2$  = Koefisien regresi Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

$\beta_3$  = Koefisien regresi ImplemenPtasi Standar Akuntansi Pemerintah (X3)

$\beta_4$  = Koefisien regresi Pemahaman Basis Akrual (X4)

SDM = Sumber Daya Manusia

PKD = Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

SAP = Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

PBA = Pemahaman Basis Akrual

e = Error

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 79 kuesioner yang diantar langsung ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali dengan responden sebanyak 79. Setelah 2 minggu kuesioner kembali semua, kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 41 kuesioner, sehingga diperoleh sampel yang dapat diolah sebanyak 38 kuesioner.

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel

Karakteristik Sampel	Jumlah
Jumlah pegawai BKD di Kabupaten Boyolali	79
Pegawai yang tidak bekerja dalam bidang Akuntansi	(19)
Pegawai yang tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Akuntansi	(16)
Masa kerja kurang dari 1 tahun	(6)
<b>Jumlah sampel akhir</b>	<b>38</b>

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM_TOT	38	29,4561	37,6177	33,7368	1,97064
PKD_TOT	38	-7,57558	3,54386	0	2,05125
SAP_TOT	38	-2,172	1,969	0	1
PBA_TOT	38	-3,488	1,1632	0	0,944

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel SDM memiliki nilai minimum 29,4561, nilai maksimum 37,6177, mean sebesar 33,7368 dan nilai standar deviasi sebesar 1,97064. Variabel PKD memiliki nilai minimum -7,57558, nilai maksimum 3,54386, mean sebesar ,00000, dan nilai standar deviasi sebesar 2,05125. Variabel SAP memiliki nilai minimum -2,172, nilai maksimum 1,969., mean sebesar ,000, dan nilai standar deviasi sebesar 1,000. Variabel PBA memiliki nilai minimum -3,488, nilai maksimum 1,632, mean sebesar ,000, dan nilai standar deviasi sebesar ,944.

#### 3.1.2 Uji Kualitas Data

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas instrumen akan dilakukan dengan korelasi Product-moment Pearson. Jika nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel maka dapat disimpulkan item valid. Apabila nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel maka dapat disimpulkan item tidak valid (Ghozali, 2011:53). Dalam penelitian ini uji validitas dengan menggunakan SPSS 20 hasilnya  $r$  hitung  $> 0,320$  maka hasilnya dikatakan VALID.

## 2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Suatu validitas dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ . Hasil pengujian dalam penelitian ini seluruh variabel penelitian adalah RELIABEL.

### 3.1.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan normal tidaknya data pada variabel dependen yang dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogrov-smirnov*. Kriteria pengujian yang digunakan adalah p-value, apabila nilai p-value  $> 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal, dan apabila jika p-value  $< 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogrov-Sminornov	p-value	Keterangan
Unstandardizes Residual	0,75	0,628	Data terdistribusi Normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kolmogorov-smirnov adalah 0,750 dengan probabilitas (p) 0,628. Perbandingan antara probabilitas dengan taraf signifikansi 5% nilai hitung probabilitas adalah 0,625 sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi terdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SDM_TOT	0,548	1,825	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PKD_TOT	0,451	2,22	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SAP_TOT	0,168	5,96	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PBA_TOT	0,257	3,884	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10 ini berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai > 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen di dalam model regresi.

## 3) Uji heterodekastisitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
SDM_TOT	0,547	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
PKD_TOT	0,089	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
SAP_TOT	0,586	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
PBA_TOT	0,886	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dengan model regresi menunjukkan hasil signifikasi variabel SDM, PKD, SAP, dan PBA terhadap KLL >0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian sehingga model regresi layak untuk dipertimbangkan materialitasnya.

### 3.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman

basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 6 . Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	7,677	1,325	0,194	
SDM_TOT	0,265	1,841	0,075	Signifikan
PKD_TOT	0,198	1,134	0,265	Tidak Signifikan
SAP_TOT	0,08	0,583	0,564	Tidak Signifikan
PBA_TOT	0,111	0,512	0,612	Tidak Signifikan

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

$$KLK = 7,677 + 0,265SDM + 0,198PKD + 0,080SAP + 0,111PBA + e$$

Pesamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 7,677, dengan parameter positif menunjukkan bahwa sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.
- 2) Besarnya nilai koefisien variabel sumber daya manusia (SDM) sebesar 0,265 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan sumber daya manusia (SDM) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,265 atau sebesar 26,5% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- 3) Besarnya nilai koefisien variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah (PKD) sebesar 0,198 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah (PKD) akan meningkatkan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,198 atau 19,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- 4) Besarnya nilai koefisien variabel implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) sebesar 0,080 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) akan meningkatkan implementasi standar akuntansi pemerintah sebesar 0,080 atau 8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.



- 5) Besarnya nilai koefisien variabel pemahaman basis akrual (PBA) sebesar 0,111 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemahaman basis akrual (PBA) akan meningkatkan pemahaman basis akrual sebesar 0,111 atau 11,1% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

### 3.1.5 Uji Statistik t

- 1) Variabel sumber daya manusia memiliki nilai t hitung sebesar 1,841 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,034 dan nilai signifikan 0,075 lebih kecil dari 0,1. Hal ini berarti **H1 diterima**, sehingga sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 1,134 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,034 dan nilai signifikan 0,265 lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti **H2 ditolak**, sehingga penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Variabel implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 0,583 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,034 dan nilai signifikan 0,564 lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti **H3 ditolak**, sehingga implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Variabel pemahaman basis akrual memiliki nilai t hitung sebesar 0,512 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,034 dan nilai signifikan 0,612 lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti **H4 ditolak**, sehingga pemahaman basis akrual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3.1.6 Uji F

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS 20 diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 7,614 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,65 dengan angka signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata lain ada pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3.1.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,417. Hal ini menunjukkan bahwa 41,7% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa dijelaskan oleh variasi sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual. Sedangkan sisanya 58,3% lainnya dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji t dapat untuk variabel sumber daya manusia memiliki nilai t hitung  $1,841 < t \text{ tabel } 2,034$  dan nilai signifikan  $0,075 < 0,1$ . Hal ini berarti  $H_1$  diterima, sehingga sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan, maka SDM yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dan tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan. Maka diharapkan BKD dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### **3.2.2 Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji t untuk variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai t hitung  $1,134 < t \text{ tabel } 2,034$  dan nilai signifikan  $0,265 > 0,1$ . Hal ini berarti  $H_2$  ditolak, sehingga penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala dan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kurang optimalnya penggunaan Anggaran Daerah menyebabkan BKD Kabupaten Boyolali belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana untuk sumber-sumber penerimaan baru. Masalah lainnya yaitu tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 24 Miliar. Tunggakan PBB itu diketahui setelah pengelolaan PBB dilimpahkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Pemkab Boyolali.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nagor, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa variabel penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3.2.3 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil uji t untuk variabel implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki nilai  $t$  hitung  $0,583 < t$  tabel  $2,034$  dan nilai signifikan  $0,564 > 0,1$ . Hal ini berarti  $H_3$  ditolak, sehingga implementasi standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena adanya beberapa kendala dalam penerapan SAP, di antaranya sumber daya manusia yang belum memadai, struktur organisasi dan aspek sosialisasi dan pendampingan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nufus (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3.2.4 Pemahaman Basis AkruaI Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji t untuk variabel pemahaman basis akrual memiliki nilai t hitung sebesar  $0,512 < 2,034$  dan nilai signifikan  $0,612 > 0,1$ . Hal ini berarti H4 ditolak, sehingga pemahaman basis akrual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala dalam pemahaman basis akrual, antara lain sistem dan aplikasi yang digunakan, kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya keterampilan dalam pemahaman basis akrual, dan di Indonesia masih susah menerapkan sistem basis akrual karena mereka sudah terbiasa memakai basis kas.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah kualitas laporan keuangan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 diterima.
- 2) Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H2 ditolak.
- 3) Implementasi standar akuntansi pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H3 ditolak.
- 4) Pemahaman basis akrual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H4 ditolak.

## 4.2 Saran

- 1) Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya BKD di Kabupaten Boyolali lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemahaman basis akrual dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh dari variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada satu dinas seperti pada penelitian ini yang hanya terfokus pada satu dinas yaitu BKD di Kabupaten Boyolali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dora, Sofia. 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan).
- Fikri, dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *Simporsium Nasional Akuntansi 18* Universitas Sumatera Utara.
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Dharma Ekonomi. No.36
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).
- Jensen dan Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4). pp305-306.
- Karmila, dkk. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot*. Universitas Riau. Vol. 9 No.1.

- Kartikasari. 2012. Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.
- Kiranayanti dan Erawati. 2016. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.
- Lane. 2013. The Principal-Agent Approach to Politics: Policy Implementation and Public-Making. Jurnal of Political Science. University of Freiburg. Vol.3 No.2.
- Mahlil dan Yahya. 2017. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Vol.2 No.2.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik..* Yogyakarta. Andi
- Nagor Teuku Fahrian, dkk. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat)”. Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala. ISSN: 2302-0164.
- Nufus, Khayatun. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang. Vol.3 No.2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Permendagri No13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP. RI No.24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- PP. RI No.58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP. RI No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Purwaningrum, Idha. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Rahayu, Sari. 2014. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaL Di Jombang. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Roviyantie, D. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Siliwangi.
- Suhaeti dan Suhendar. 2015. “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan”. JRKA Universitas Kuningan. Vol 1 Isue 2.
- Soimah. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Universitas Bengkulu
- Tickell. 2010. Cash To Accrual Accounting: One Nation’s Dilemma. International Business & Economics research Journal, Vol.9,No.11. Hal 71-78.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. [www.gtzfdm.or.id](http://www.gtzfdm.or.id).
- Wati, dkk. 2014. Pengaruh SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi. Vol.2, No.1. Universitas Pendidikan Ganesha.